

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH UNTUK
MEWUJUDKAN SMART CITY (Studi Kasus di Badan Pengelolaan dan Aset
Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur)**

Angelya Deanita Andriana Putri
NPP.32.0506

Asdaf Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email: angelyadap@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The problem that motivates researchers to take this title is how the implementation of local government information systems in regional financial reporting to realize Smart City. **Purpose:** to know and describe the implementation of local government information systems in regional financial reporting to realize Smart City. **Method:** the method used by researchers is Researchers chose an inductive quasi-qualitative research approach. The data sources used were primary and secondary data sources. This study selected four informants using purposive sampling. Data collection in this study through interviews, observation, and documentation, Meanwhile, the data analysis techniques used in the study used methods, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research was conducted at the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya City, East Java Province. The research was conducted from January 6 to January 25, 2025. **Results/Findings:** the findings obtained are that good regional financial management is an important component in realizing smart cities, where transparent and accountable governance can increase public trust in the government. The study also identified several obstacles in the implementation of SIPD, including the length of the data input process which became an obstacle in the operation of the system. **Conclusion:** The implementation of the Local Government Information System in local financial reporting in Surabaya City has been implemented in accordance with instructions from the Ministry of Home Affairs (MOHA). Although this system has great potential to improve transparency, efficiency, and accountability in regional financial management there are still some obstacles that need to be overcome. **Keywords:** Implementation, smart city, Local Government Information System (SIPD), financial reporting, local financial management.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *Smart City*. **Tujuan:** untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *Smart City*. **Metode:** metode yang digunakan peneliti adalah Peneliti memilih pendekatan penelitian *quasi-qualitative* induktif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan

sekunder. Penelitian ini memilih informan sebanyak empat orang menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari hingga 25 Januari tahun 2025. **Hasil/Temuan:** temuan yang diperoleh yakni pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan komponen penting dalam mewujudkan smart city, di mana tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi SIPD, termasuk lamanya proses input data yang menjadi hambatan dalam pengoperasian sistem. **Kesimpulan:** Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah di Kota Surabaya itu telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi.

Kata Kunci: Implementasi, *smart city*, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pelaporan keuangan, pengelolaan keuangan daerah.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia menghadapi tantangan urbanisasi yang kompleks, termasuk pertumbuhan penduduk, kemacetan, dan pengelolaan lingkungan. Dalam mengantisipasi dan mengelola tantangan ini, Pemerintah Kota Surabaya mulai mengadopsi konsep *Smart City* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk terintegrasi sistem teknologi dan informasi pada pelayanan publik di pemerintahan daerah (Mulyadi et al., 2021). Pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi kemajuan daerah (Zein & Septiani, 2024). *Smart City* hadir untuk mengembangkan sebuah kota dalam suatu negara dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Selain itu, keberadaan *smart city* juga berperan dalam mengoptimalkan mutu layanan bagi masyarakat (Hidayat & Soetarto, 2022). SIPD diimplementasikan juga bertujuan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, penyelenggaraan pengelolaan perencanaan serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data (Balqis et al., 2021). Sejalan dengan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan dan mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pelaporan keuangan digital. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang *real-time*, akurat, dan transparan (Putriani & Fanida, n.d.). Secara umum, keuangan daerah terdiri dari dua aspek utama, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah (Kadek et al., n.d.). Tingkat kualitas pelaporan keuangan memiliki peran krusial bagi seluruh pemangku kepentingan (Handayani et al., 2016).

Namun, implementasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan input data, keterbatasan pemahaman SDM, serta resistensi terhadap perubahan teknologi. Hambatan ini berdampak langsung terhadap ketepatan waktu pelaporan dan efektivitas

pelaksanaan program anggaran. Permasalahan ini juga diperburuk dengan adanya resistensi dari pegawai terhadap perubahan sistem kerja, dari metode manual ke sistem digital, yang menunjukkan rendahnya tingkat kesiapan mental dan adaptasi terhadap inovasi teknologi (Fitriana, 2022).

Tabel 1. 2
Permasalahan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Di Kota Surabaya

No	Sumber	Permasalahan
1.	Jatim.bpk.go.id	Sistem Informasi Pemerintah Daerah terkendala sejak awal tahun, dana APBD tidak bisa dicairkan. Alhasil program Pemerintah Kota Surabaya tersendat.
2.	Kominfo.jatimprov.go.id	Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki kendala sebagai berikut: 1. Lamanya proses input data 2. Lamanya proses pemuatan (loading) Ketika menginput data sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian dokumen dan pembahasan di DPRD.
3.	Jatim.bpk.go.id	Macetnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Surabaya, Hal ini menghambat kelancaran jalannya pemerintahan, disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 belum dapat dimanfaatkan secara optimal

Sumber : Diolah oleh peneliti,

Hal ini diperkuat oleh laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kominfo Jatim, yang menyoroti lambannya proses input SIPD yang menyebabkan keterlambatan pencairan APBD dan pembahasan di DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Surabaya menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi spesifik daerah tersebut, termasuk kompleksitas pengelolaan data, kesiapan infrastruktur teknologi, dan dinamika pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di sejumlah wilayah seperti Kota Medan, Semarang, dan Tidore, dengan fokus utama pada sistem perencanaan dan penganggaran. Beberapa studi bahkan menilai efektivitas SIPD dalam mendukung tata kelola keuangan daerah secara umum. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana implementasi SIPD berdampak terhadap pelaporan keuangan daerah dalam konteks pembangunan smart city. Padahal, pelaporan keuangan merupakan komponen

strategis yang menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menjadi fondasi bagi penilaian kinerja keuangan publik. Sejalan dengan penelitian Amyar (2021) bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dirancang untuk menciptakan lingkungan operasional yang selaras dengan nilai-nilai etika, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam literatur akademik yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih terfokus dan kontekstual (Amyar et al., 2021).

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu umumnya kurang menyoroti faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIPD, seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta hambatan kultural berupa resistensi terhadap digitalisasi dalam birokrasi. Dalam konteks Kota Surabaya, yang telah lima tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, kenyataannya implementasi SIPD masih menghadapi kendala signifikan, seperti lambatnya proses input data dan kurangnya pemahaman teknis pegawai terhadap sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dan kenyataan operasional di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi SIPD dalam pelaporan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola berbasis smart city yang efisien dan akuntabel.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada kajian dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian sebelumnya merupakan rangkuman dari berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021) menganalisis terkait Implementasi Sistem Informasi Daerah yang digunakan pada Pemerintah Kota Medan berperan dalam mengelola sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta berbagai aspek lain dalam pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah memanfaatkan aplikasi SIPD dalam merumuskan kebijakan serta menjalankan berbagai program yang menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kota Medan (Nasution & M.Si, 2021). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hendra (2023) menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah telah berjalan, namun masih terdapat kendala dalam aspek sumber daya, terutama pada fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap). Meskipun fitur yang diperlukan telah tersedia, akses terhadapnya masih terbatas ((Hendra et al., 2023)).

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Faruk pada tahun 2023 mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Artikel ini dijadikan referensi karena memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yakni membahas penerapan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (Faruk, 2023).

Penelitian keempat yang menjadi referensi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra dan Pradana pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan anggaran di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam penyusunan anggaran belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman

pengguna, serta sulitnya akses ke server (Pradana & Hendra, 2023). Terakhir, penelitian pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Ratu membahas terkait Optimalisasi Pelaporan Pendapatan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam optimalisasi pelaporan pendapatan daerah di Kota Palopo telah berjalan dengan baik. BPKAD mengoperasikan SIPD sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan transparansi serta memperlancar koordinasi dalam pelaporan pendapatan daerah. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek teknologi serta kebutuhan akan bimbingan teknis bagi pengguna sistem (Ratu, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaporan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Smart City. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari George Edward III yakni meliputi dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nasution (2021) yakni dari lokasi penelitian. Selanjutnya, penelitian ini juga berbeda dari penelitian oleh Ratu Surya raymhard (2024) yang mana pada penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pelaporan pendapatan daerah di Kota Palopo telah berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokus dan teori yang digunakan (Ratu, 2024). Sehingga hal inilah yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Asep Hendra (2023) yang menyatakan bahwa implementasi system informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran belum berjalan baik, jika penelitian ini menyatakan bahwa implementasi SIPD pelaporan keuangan daerah di Kota Surabaya sudah sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, lokus penelitian yang digunakan dan teori yang digunakan. Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city*. Kemudian, Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city*. Selanjutnya, Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city* daerah

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah Peneliti memilih pendekatan penelitian *quasi-qualitative* induktif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari George Edward III yakni meliputi dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan dalam sebuah penulisan penelitian ataupun karya ilmiah (Sugiyono, 2019) Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini memilih informan sebanyak empat orang menggunakan *purposive sampling*. Sampel purposif

dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu sesuai prosedur yang sudah ditentukan (Nurdin & Dra Sri Hartati, 2019). Sebanyak empat Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, tepat, dan akurat terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Simangunsong, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan selama dua minggu mulai tanggal 6 Januari hingga 25 Januari tahun 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi dalam Perluasan Basis Penerimaan

Fokus Peneliti pada Penelitian ini pada Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah pada implementasi sistem informasi daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pelaporan keuangan. Implementasi kebijakan berperan dalam menjembatani berbagai aspek yang memungkinkan pencapaian tujuan kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Tangkilisan, 2003). Penelitian ini peneliti mendalami mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city* dengan menggunakan teori George Edward III mengenai pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi diantaranya yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Terry dan Franklin Komunikasi adalah proses menukar informasi dan perasaan di antara dua orang atau lebih. (Lubis, 2020). Definisi ini menyoroti betapa pentingnya komunikasi dalam konteks organisasi, di mana komunikasi yang baik sangat penting untuk tujuan bersama. Masalah utama dalam komunikasi ini adalah kendala pada sumber daya manusia yaitu terbatasnya jumlah pegawai pada pemerintah pusat untuk handle seluruh Indonesia dan hal tersebut yang menyebabkan kurangnya koordinasi sehingga kurangnya komunikasi dan koordinasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dan kendala mengenai *loading* lama pada saat *input* data. Meskipun terdapat saluran komunikasi formal yang menghubungkan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tapi masih terjadi lambatnya respon dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam dan berinisiatif untuk menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan membuat sistem aplikasi berbasis digital dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

2. Sumberdaya

Segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu disebut sumber daya. Kinerja pemerintah daerah memainkan peran penting dalam membentuk arah perekonomian (Zein et al., 2024). Kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan mengacu pada keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan pejabat untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, adil, dan transparan (Wihendra & Sudarmono, 2024). Pada penelitian ini, penulis menggunakan satu indikator untuk mengetahui kompetensi sumber daya

manusia dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di BPKAD. Dalam konteks SIPD, kompetensi mengacu pada kemampuan aparatur untuk memahami dan menjalankan prosedur pelaporan keuangan menggunakan sistem digital tersebut.

Secara sumber daya apalagi sumber daya manusianya sebenarnya tidak ada kendala karena dari pusat dan daerah pun sudah mendukung untuk memfasilitasi para pegawai negeri sipil dalam mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3. Disposisi

Dimensi disposisi dalam teori George Edward III berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi suatu program. Pada penelitian ini, penulis menggunakan satu indikator dalam pengukuran dimensi untuk mengetahui bagaimana bentuk disposisi yang terjadi yaitu pada komitmen pimpinan daerah dalam mendorong implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam mewujudkan *smart city*. Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan program *Smart City* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik. Meskipun implementasi SIPD yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat menghadapi beberapa kendala teknis, seperti masalah *server* dan jaringan internet yang sering terganggu akibat banyaknya pengguna, Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti berinovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pengembangan e-government, yang merupakan bagian dari program *Smart City*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian yang terdiri dari hierarki jabatan, aturan, dan prosedur yang jelas, yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan atau organisasi. Indikator dalam pengukuran dimensi ini dapat dilihat dari adanya standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah pemerintah daerah yang menginginkan kinerja Aparatur sipil negara yang cepat dan tepat, serta pemerintah pusat yang mengutamakan transparansi dan penggunaan sistem *single window*. Namun, kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi menyebabkan tumpang tindih data, keterlambatan proses, dan ketidakefisienan dalam sistem.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city*

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi SIPD untuk pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan smart city meliputi beberapa aspek strategis. Pertama, budaya organisasi yang adaptif dan inovatif memungkinkan instansi untuk lebih terbuka terhadap perubahan digital. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pengoperasian sistem secara optimal. Ketiga, adanya sistem monitoring dan evaluasi internal yang konsisten membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan teknis maupun non-teknis selama implementasi. Selain itu, dukungan infrastruktur digital nasional seperti jaringan

internet yang stabil, pusat data nasional, dan sistem keamanan informasi turut memperkuat ekosistem pelaporan keuangan berbasis digital. Kebijakan nasional yang mendukung digitalisasi pemerintahan serta sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan melalui forum bersama juga memperkuat efektivitas pelaksanaan SIPD secara menyeluruh.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi SIPD untuk pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan smart city mencakup berbagai tantangan teknis dan non-teknis. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem teknologi informasi secara optimal. Selain itu, resistensi terhadap perubahan masih sering terjadi, terutama dari pegawai yang merasa lebih nyaman menggunakan sistem lama. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga memperlambat sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan sistem. Di sisi teknis, keterbatasan konektivitas internet, perangkat keras yang belum memadai, serta gangguan teknis seperti overload pada server nasional menjadi hambatan serius dalam memastikan sistem berjalan lancar dan *real-time*

3.3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaporan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan *Smart City*

Upaya untuk mengatasi hambatan internal dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah penyelenggaraan pelatihan teknis secara rutin, pemantauan dan evaluasi berkala, serta pendekatan kepemimpinan yang persuasif dan terbuka terhadap perubahan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengadakan pelatihan-pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan (Ali, 2018). Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi yang adaptif, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta menyusun SOP yang sistematis. Selain itu, pembentukan budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan mendukung transformasi digital terus diperkuat, termasuk dengan menjalin kerja sama antarinstansi maupun dengan pihak eksternal serta memastikan koordinasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Surabaya telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek teknis dan sumber daya manusia. Meskipun Kota Surabaya secara administratif telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, pelaksanaan SIPD dalam pelaporan keuangan masih belum optimal. Kendala utama meliputi lambatnya proses input data, kurangnya pemahaman teknis operator, serta gangguan teknis seperti loading lambat dan keterbatasan akses sistem. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dengan kesiapan operasional sistem berbasis digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hendra et al. (2023) di BPKAD Kota Semarang, yang mengungkapkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan, akses terhadap

fitur sistem masih terbatas dan terkendala oleh kualitas SDM dan infrastruktur. Demikian pula, Hendra dan Pradana (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Bogor juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman pengguna terhadap sistem sebagai faktor penghambat utama dalam implementasi SIPD. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa kesuksesan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kesiapan mental dan kompetensi sumber daya manusia.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi terdahulu, seperti budaya organisasi yang adaptif, dukungan kebijakan nasional, dan adanya sistem monitoring yang konsisten. Di BPKAD Kota Surabaya, pendekatan kepemimpinan yang terbuka terhadap inovasi serta pelatihan teknis yang mulai rutin dilakukan menjadi kekuatan yang mempercepat adaptasi pegawai terhadap SIPD. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam literatur, yakni pentingnya integrasi antara pendekatan struktural (teknologi dan regulasi) dan pendekatan kultural (budaya kerja dan kepemimpinan) dalam mendukung keberhasilan pelaporan keuangan berbasis digital di era *smart city*. Penyebab utama kurangnya transparansi adalah ketidakjelasan peraturan (Ilham & Sari, 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis menyimpulkan bahwa pertama, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah di Kota Surabaya itu telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua, Faktor Penghambat secara internal dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan *smart city* meliputi Pemahaman dan Kemampuan Sumber Daya Manusia, resistensi terhadap perubahan, kurangnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan, faktor penghambat eksternal meliputi kurangnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, keterbatasan konektivitas *internet* atau perangkat keras yang mendukung, gangguan teknis atau *Overload* pada server Nasional. Ketiga, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan mengadakan pelatihan teknis secara rutin dan berkelanjutan, pendekatan kepemimpinan yang persuasif dan terbuka, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, pelaporan dan koordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, mendorong pemanfaatan teknologi yang adaptif, pemeliharaan dan pembaharuan sistem secara berkala.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga penelitian ini belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi saja di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai model penelitian yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaporan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Smart City (Studi Kasus Di Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan

jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2018). Kesiapan Desa Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan Pembangunan Desa). *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *Iii*(1). <https://doi.org/10.33701/jipk.v3i1.302>
- Amyar, F., Pamungkas Bambang, Akbar, B., & Suwarno. (2021). *Estimating The Mediating Role Of Value Chain In Good Corporate Governance And Asset Growth*. 24. <http://repository.ibik.ac.id/id/eprint/1634>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Faruk, M. R. (2023). *30.1417_F2_17_Ringkasan Skripsi M Rivai Faruk-1[1]* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14773>
- Hendra, A., Sinurat, M., & Haikal Ali, Dan. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, *5*(1). <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). Political Party Financing Regulation And Gaps For Corporate Donations: Case Of The Developing Country. *Journal Of Governance And Regulation*, *13*(1), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3>
- Mulyadi, S. F., Kurniansyah, D., & Santoso, M. P. Teguh. (20021). *Implementasi Penerapan Aplikasi Sambara Dalam Administrasi Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang*. *Vi*(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipk.v6i2.1887>
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nurdin, I., & Dra Sri Hartati, Ms. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pradana, R., & Hendra, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *15*(1), 122–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.3669>

- Ratu, R. S. (2024). *Repository_31.0841_Raynhard Surya Ratu* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19703>
- Simangunsong, F. (2016). *Buku Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Wihendra, S. W. K. P., & Sudarmono, S. (2024). An Analysis Of Public Trust Level In Performance Of Klurak Village Head, Sidoarjo Regency, East Java Province. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 88–105. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i2.4201>
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining The Role Of Local Government's Financial Performance And Capital Expenditure In Increasing Economic Growth In Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal Of Risk And Financial Management*, 17(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm17100456>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2024). The Effect Of Financial Performance On Capital Expenditure, Economic Growth, Human Development Index, And Poverty. *Quality - Access To Success*, 25(200), 188–202. <https://doi.org/10.47750/qas/25.200.20>

